

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai sarana vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang terampil dibidangnya. Pendidikan dalam pengertian bahasa disebut proses melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, perilaku, dan lain lain terutama dalam sekolah formal.¹

Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk membentuk manusia yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yang pada hakekatnya bertujuan meningkatkan kualitas manusia dan seluruh masyarakat Indonesia yang maju, modern berdasarkan Pancasila, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

¹ Qodri. A. Azizy, *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang. PT. Aneka Ilmu, 2002, hlm. 18.

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali, secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan.²

Pendidikan diakui sebagai investasi sumber daya manusia yang akan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktifitas. Jika pendidikan di tempatkan pada posisi upaya untuk mencerdaskan bangsa dalam konteks madani, maka diperlukan keberanian investasi yang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Sementara itu, pendidikan nasional di hadapkan pada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua.³

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam manajemen administrasi pendidikan.⁴ Karena biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga lembaga keuangan pondok pesantren diperlukan

² Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm. 6.

³ Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hlm. 78.

⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 1.

pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien, agar menghasilkan mutu pelayanan administrasi terbaik.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.⁵ Pendidikan swasta dalam konteks pembiayaan pendidikan mendapat bagian paling kecil dari pemerintah, karena pembiayaan atau pendanaan bagi satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat, satuan pendidikan yang bersangkutan.⁶

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dalam operasional sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi bergantung pada kondisi masing-masing negara, seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan administrasi sekolah.

Manajemen pembiayaan pendidikan pondok pesantren Manba'ul Ulum kabupaten Cirebon, merupakan salah satu pondok pesantren yang dikenal dengan pembiayaan pendidikan yang cukup tinggi. Dan juga merupakan pondok pesantren favorit di daerah kabupaten Cirebon. Bagaimana tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orangtua disebabkan banyaknya komponen

⁵ Baihaqi & Nasir Usman, *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, Volume, No 1 Agustus 2012, hlm. 16.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2010), hlm. 229-230.

biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya administrasi santri baru, biaya SPP, pembayaran uang makan, laundry dan lainnya.

Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan maka sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Dalam menjalankan proses manajemen pembiayaan pondok pesantren menggunakan sistem. Dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah sistem teknologi, yang ternyata agak kesulitan dalam hal migrasi sistem. Dahulu pondok pesantren menggunakan sistem manual dan dengan berkembangnya teknologi maka adanya tuntutan zaman menuju sistem yang lebih baik dan menunjang keberlangsungan proses manajemen.

Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan pondok.

Dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan akan lebih baik. Pada satuan pendidikan, pembiayaan pendidikan diperoleh dari iuran santri,

dan sumbangan masyarakat. Se jauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok (RAPBP), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat pondok pesantren berasal dari para santri atau yayasan.

Dalam hal ini, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan hal yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan atau keberlangsungan Pondok Pesantren Manba'ul Ulum. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam manajemen pembiayaan *Student Payment Center* atau SPC, yang menuntut kemampuan pondok untuk merencanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada para walisantri dan masyarakat sekitar.

Proses pembiayaan pendidikan semakin hari semakin meningkat dengan adanya sorotan kepercayaan dari pihak orang tua untuk memondokkan putra adan pun putrinya sehingga mendapatkan pendapatan tambahan didalam bidang administrasi untuk eksistensi keberadaan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Cirebon dengan model pondok pesantren semi modern.

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh pihak keuangan pondok pesantren. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara pondok pesantren dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap pondok, letak pondok dan julukan pondok. Pada pondok-pondok biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada pondok-pondok biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena pondok harus mampu

menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Sejauh ini lembaga pondok pesantren tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena untuk kebutuhan operasional pondok mulai dari penggajian guru, karyawan sampai menambah atau memperbaiki fasilitas pondok guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pondok itu sendiri, dan untuk membiayai kebutuhan pondok yang lain. Pihak pondok mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orangtua diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan tujuan pondok yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum merupakan lembaga swasta yang telah melaksanakan konsep manajemen pembiayaan, *budgeting*, *accounting*, dan *auditing*. Dalam prosesnya lembaga membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja pondok (RAPBP) sehingga lembaga tersebut dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan dalam satu tahun.

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Thomas H. Jones yang menyatakan bahwa kegiatan inti dalam manajemen pembiayaan pendidikan bisa dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*auditing*). Jika ketiga komponen ini dilakukan secara profesional maka manajemen keuangan pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁷

⁷ Arwildayanto, Nani Lamatenggo, and Warni Turne Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan* (Jawa Barat: Widya, 2017), hlm. 23.

Dengan demikian pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan.⁸ Dan pentingnya manajemen pembiayaan karena untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.⁹ Bagi mayoritas masyarakat, pendidikan di sekolah sangat penting karena merupakan bagian dari investasi pembangunan bangsa.¹⁰ Untuk menunjang sebuah proses pendidikan serta berjalannya proses belajar mengajar dengan baik serta menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi guru maupun murid, maka diperlukan suatu mutu pelayanan administrasi yang efektif dan efisien serta memadai.

Mutu pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi lembaga untuk mencapai kepuasan konsumen. Suatu pendidikan bermutu tergantung pada tujuan yang akan dilakukan dalam pendidikan. Fungsi strategis bagian administrasi terjadi karena layanan administrasi menjangkau keseluruhan operasional organisasi. Tercapainya tujuan pendidikan yang baik berhubungan dengan bagaimana kualitas organisasi yang ada di lembaga tersebut. Mutu layanan administrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pegawai bagian administrasi dalam memberikan kepuasan layanan administrasi kepada pihak yang dilayani dilingkungan sekolah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum, bahwa pondok pesantren ini merupakan lembaga

⁸ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), hlm. 5.

⁹ Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

¹⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 50.

pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Wakaf Manba'ul 'Ulum yang terletak di Jl. Nyi Ageng Serang Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dalam perjalanan sejarahnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu yang dapat dilihat dari perkembangan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum yakni dari segi pelayanan administrasi, bangunan fisik lembaga yang semakin baik, ruang asrama dan kelas semakin bertambah, sarana dan prasarananya yang mulai terlengkapi, perkembangan ini tidak akan terpenuhi jika tidak memiliki biaya yang memadai dan pengelolaan dana yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon, dalam masalah manajemen pembiayaan *Student Payment Center* atau SPC sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan administrasi yang baik. Karena pondok pesantren Manba'ul 'Ulum Cirebon tergolong ke dalam kriteria pondok pesantren favorit dengan sistem yang semi modern maka tidak bisa dipungkir bahwa dalam manajemen keuangannya harus menggunakan sistem yang terbaik salah satunya dengan menggunakan sistem manajemen *Student Payment Center* atau disingkat SPC yang mana seluruh pembiayaan pondok pesantren bisa dilakukan secara *cashless* atau secara *virtual account* dengan menggunakan *mobile banking* ataupun yang lainnya dan para walisantri tidak perlu datang ke pondok pesantren untuk melakukan administrasi pembiayaan wajib pondok.

Untuk memudahkan dan terarahnya penelitian, peneliti merumuskannya dalam judul penelitian sebagai berikut: "Manajemen Pembiayaan *Student*

Payment Center (SPC) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon"

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pendahuluan serta fokus dan sub fokus masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah dalam meneliti manajemen pembiayaan *Student Payment Center (SPC)* dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di pondok pesantren manba'ul 'ulum kabupaten cirebon dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana proses perencanaan manajemen pembiayaan SPC dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana strategi manajemen pembiayaan SPC dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana bentuk evaluasi manajemen pembiayaan SPC dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka agar sebuah pembahasan memiliki arah haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan mengarah pada rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui proses perencanaan manajemen pembiayaan SPC dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui strategi manajemen pembiayaan SPC dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bentuk evaluasi manajemen pembiayaan SPC dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Penulis

Memberikan manfaat besar kepada peneliti dalam rangka menambah wawasan keilmuan bidang manajemen pendidikan terutama dalam manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh sistem *Student Payment Center* atau SPC.

b. Lembaga (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Sebagai tolak ukur kualitas dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi serta untuk meningkatkan kualitas akademik dan

kompetensi mahasiswa pascasarjana program manajemen pendidikan Islam (MPI).

c. Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon

Memberikan masukan yang berharga dalam memberikan pandangan yang luas dalam membangun mutu pelayanan administrasi yang baik, khususnya dalam bidang pembiayaan di pondok pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon.

d. Peneliti lain

- a) Menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi.
- b) Menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut khususnya bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, peneliti perlu melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran tersebut, diperoleh informasi beberapa penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang peneliti kaji yang hampir sesuai dengan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Agus Lestari, dalam penelitiannya dengan judul “Manajemen Pembiayaan Terpadu (Studi atas Yayasan Pondok Pesantren Darul Fallah Sukerejo Ponorogo)”¹¹ Penelitian ini memfokuskan pada proses pembuatan kebijakan manajemen pembiayaan terpadu dan ruang lingkup manajemen

¹¹ Agus Lestari, “Manajemen Pembiayaan Terpadu (Studi Atas Yayasan Pondok Pesantren Darul Fallah Sukorejo Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 10.

pembiayaan terpadu di YPPDF. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Manajemen Pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan *flat grant* model dan *equalization* model. *Flat grant* model mendistribusikan dana ke masing-masing lembaga tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh setiap lembaga. Pembagian dana mempertimbangkan perbedaan variasi unit *cost* untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda. *Equalization* model, dalam model ini dana lembaga pendidikan yang melimpah dialokasikan bagi lembaga pendidikan yang sedikit pemasukannya. Dalam model ini yang lebih untuk biaya permurid, perguru, atau unit-unit lainnya yang perlu dialokasikan bagi lembaga yang kurang memiliki sumber yang kurang atau menengah agar tetap biasa melaksanakan program pendidikan dengan baik. Perumusan kebijakan pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan teori rasional, dengan mempertimbangkan *cost-benefit analysis*, analisis ini berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sektor pendidikan berdasarkan kemanfaatan. 2) Ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu YPPDF Sukorejo Ponorogo meliputi proses perencanaan anggaran (*budgeting*), penatausahaan pembiayaan/keuangan (*accounting*) dan pemeriksaan penggunaan anggaran (*auditing*).

- 2) Buhari Luneto, dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah”.¹² Biaya adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik

¹² Luneto. Buhari, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah”, Jurnal Tadbir, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 3 No. 2 (2015). Hlm. 15.

dalam bentuk uang atau barang dan tenaga. Masalah dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana biaya yang diperoleh itu direncanakan, dan dialokasikan. Biaya yang dikeluarkan dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar, sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar. Kesimpulannya adalah bahwa hal terpenting pada penyusunan RAPBS/M adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan agar keberhasilan program dapat dicapai. Berdasarkan kajian dari kelima hasil penelitian tersebut dapat disarikan bahwa kelimanya lebih menekankan pada tataran keefektifan pembiayaan, pengawasan, akuntansi, pertanggungjawaban perumusan sistem pembiayaan dan kebermanfaatan manajemen pembiayaan, sehingga penulis perlu memaksimalkan fungsi manajemen yang lain dalam pembiayaan pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penelitian baru yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

- 3) Eny Masruroh, dalam penelitiannya dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar”.¹³ Penelitian ini berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

¹³ Eny Masruroh, “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*” (IAIN Ponorogo: 2019), hlm. 74-75.

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, dilembaga tersebut meliputi penentuan rancangan anggaran, menentukan sumber dana, dan penyusunan serta pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Adapun Program peningkatan kualitas guru yang dilakukan diantaranya memperhatikan penyeleksian penerimaan guru, melakukan beberapa program pengembangan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Jenis pembukuan yang digunakan yaitu buku kas umum. (3) Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru terdapat dua bentuk, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan yang meliputi evaluasi bulanan dan tahunan, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pemerintah.

- 4) M. Jupri, dalam penelitiannya yang berjudul “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI”.¹⁴ Rintisan sekolah bertaraf internasional banyak diminati masyarakat, tetapi untuk mendapatkan pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tinggi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan SMP N 2 RSBI Rembang dengan fokus, penganggaran, akuntansi, dan auditing, hasil penelitian menunjukkan

¹⁴ Jupri, M, *Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Menuju SBI Di SMP N 2 Rembang*, Journal of Economic Education, Vol, 1,(2012), hlm. 21.

bahwa SMP N 2 RSBI Rembang, dalam proses pembiayaan pendidikan melibatkan banyak pihak, pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan telah sesuai dengan data. Pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan melalui audit internal dan eksternal sekolah. Disarankan sekolah dapat melibatkan pengurus osis dalam tim sekolah untuk mendapatkan usulan yang berkenaan dengan kebutuhan peserta didik dalam anggaran sekolah. Sekolah memiliki ahli IT untuk membantu mengelola sistem informasi dan keuangan sekolah, pemerintah kabupaten dapat membuat standar iuran masyarakat untuk RSBI/SBI agar pembiayaan bisa transparan. Dalam alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan tim penyusun anggaran sekolah dibentuk sebelum tahun pelajaran berjalan. Rancangan anggaran dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan Kab Rembang, selanjutnya dimintakan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua Dinas Pendidikan dan pengesahan dari Dinas Pendidikan agar RAPBS menjadi APBS.

- 5) Lulus Aryani I, dalam penelitiannya dengan judul “Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan (Studi kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)”.¹⁵ Penelitian ini difokuskan pada strategi yang digunakan lembaga melalui manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu Lembaga. Dari hasil penelitian ini terdapat tiga strategi yaitu 1) strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu guru, yaitu menekankan pada profesionalisme dan disiplin, serta komitmen tugas untuk meningkatkan mutu sekolah; 2)

¹⁵ Lulus Aryani I, “*Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan. (Studi kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)*”, (IAIN Salatiga, 2015), hlm.

strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya pembinaan siswa dilakukan melalui pembinaan dibidang seni, olahraga, keagamaan, pramuka, bahasa inggris, dan kepribadian; 3) strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sumber pembiayaan, menjalankan program peningkatan mutu untuk mendukung sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru.

- 6) Armida, dalam penelitiannya yang berjudul “Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia”.¹⁶ Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Dalam sejarah Indonesia, setidaknya ada dua model pembiayaan pendidikan. Model pertama adalah sentralisasi, yang dilaksanakan pada masa orde baru, dan model desentralisasi yang dilaksanakan pada masa orde reformasi. Dalam hal pembiayaan ada tiga komponen yang bertanggung jawab, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kesimpulannya adalah dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.
- 7) Kisbiyanto, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan”.¹⁷ Pembiayaan pendidikan sangat penting untuk perencanaan pendidikan dan para pembuat kebijakan pendidikan.

¹⁶ Armida, “*Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*”, Jurnal Media Akademika, Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha, Vol.26, No.1, (2011), hlm. 11.

¹⁷ Kisbiyanto, “*Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*”, Elementary, Vol 2 No 1, (2014), hlm. 160.

Ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan (*manajemen of finance*) yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah maupun mutunya. Pembiayaan pendidikan sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan memerlukan analisis yang cermat dan tepat sehingga pengelolaan pendidikan bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran terletak pada ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. Efektivitas anggaran terletak pada besarnya capaian tujuan pendidikan yang didukung oleh penggunaan anggaran pendidikan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tesis ini, penulis membuat sistematika dengan praktis yang diharapkan akan mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam tesis ini. Tesis ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, dan dalam bab-bab tersebut terisi dalam sub sub sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan merupakan bab berisi uraian yang harus diketahui supaya mengerti dan memahami bab-bab selanjutnya dengan baik. Adapun alasan penulis mengambil judul penelitian terangkum didalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan teori yang berisikan kepustakaan selanjutnya peneliti menuliskan judul Manajemen Pembiayaan *Student Payment*

Center (SPC) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi
Di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon.

BAB III : Metodologi penelitian yang didalam menjelaskan perihal metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan profil tentang Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon sebagai tempat penelitian, kemudian pada bab ini dijelaskan Manajemen Pembiayaan *Student Payment Center* (SPC) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon.

BAB V : Penutup menjelaskan kesimpulan tentang Manajemen Pembiayaan *Student Payment Center* (SPC) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kabupaten Cirebon.

